

Abstrak

Terlihat dari komposisi anggaran pada 2022, dari pendapatan Provinsi Aceh sebesar Rp.13,35 triliun, PAD hanya sebesar Rp.2,56 triliun. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat mencapai Rp.10,77 triliun dan sebesar Rp.7,50 triliunnya merupakan dana otonomi khusus. Tujuan dari tulisan ini mengetahui kinerja keuangan seluruh kabupaten/kota di Aceh dan Provinsi Aceh periode 2018-2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menjelaskan data numerik yang didapatkan dengan melakukan analisis rasio. Analisis rasio yang dilakukan meliputi kemandirian keuangan, efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, keserasian belanja, dan DSCR. Rasio kemandirian menunjukan daerah di Aceh 22 daerah dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kenaikan efektivitas dapat dilihat dari pencapaian target PAD dari 9 daerah pada 2018 menjadi 11 daerah pada 2020. Penggunaan dana masih belum berimbang karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional. Pemerintah daerah Aceh sangat efisien dalam mengelola biaya dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan PAD daerah di Provinsi Aceh sangat beragam. Pemerintah Aceh memiliki kemampuan membayar kembali pinjaman yang sangat baik karena semua perhitungan DSCR diatas 2,5%.

Kata kunci : kinerja keuangan, perbandingan, analisis rasio

Abstract

Based on the budget composition in 2022, it can be seen that out of Aceh Province's revenue of Rp13.35 trillion, local own-source revenue (PAD) only amounts to Rp2.56 trillion. The transfer income from the Central Government reached Rp10.77 trillion, of which Rp7.50 trillion was in the form of special autonomy funds. The purpose of this writing is to assess the financial performance of all cities in Aceh and Aceh Province during the period of 2018-2020. The method used is a qualitative approach to explain the numerical data obtained through ratio analysis. The ratio analysis covers financial self-reliance, efficiency, effectiveness, growth, expenditure alignment, and Debt Service Coverage Ratio (DSCR). The financial self-reliance ratio indicates that 22 regions in Aceh are considered incapable of implementing regional autonomy. The effectiveness has improved as seen in the achievement of PAD targets, increasing from 9 regions in 2018 to 11 regions in 2020. The allocation of funds is still imbalanced as the majority of the regional budget (APBD) is still used for operational expenses. Aceh local government is highly efficient in managing costs related to collecting local own-source revenue. The growth of local own-source revenue in Aceh Province varies significantly among regions. Aceh government has a strong ability to repay loans, as indicated by all DSCR calculations exceeding 2.5%.

Keywords : financial performance, comparison, ratio analysis